

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	V
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONAL KPU DAN BAWASLU DALAM VERIFIKAI PARTAI POLITIK, TEORI KEWENANGAN, TEORI KEPASTIAN HUKU, TEORI DEMOKRASI DAN TEORI PENGAWASAN.....	27
A. Komisi Pemilhan Umum.....	27
B. Badan Pengawas Pemilu.....	30
C. Hubungan Fungional.....	38
D. Verifikasi Partai Politik.....	38
E. Teori Kewenangan	40
F. Teori Kepastian Hukum	45
G. Teori Demokrasi	48
H. Teori Pengawasan	51

BAB III PENGATURAN TENTANG PEMILU DI INDONESIA	
DAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK	
PESERTA PEMILU	61
A. Pemilu Di Indonesia	61
1. Pemilu Pasca kemerdekaan	62
2. Pemilu Orde Baru	63
3. Pemilu era Reformasi	65
B. Tahapan Verifikasi Partai Politik	69
1. Verifikasi Pemilu 1999	69
2. Verifikasi Pemilu 2004	71
3. Verifikasi Pemilu 2009	73
4. Verifikasi Pemilu 2014.....	75
5. Verifikasi Pemilu 2019	78
BAB IV HUBUNGAN FUNGSIONAL KPU DENGAN BAWASLU	
DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA	
PEMILU	81
A. Pola Hubungan Antara KPU dengan Bawaslu Dalam Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	81
B. Hubungan Fungsional KPU Dan Bawaslu Dalam Verifikasi Partai Politik Dalam mewujudkan Partai Yang Berintegritas	141
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149

Abstrak

Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Dalam penyelenggaraan Pemilu, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan Pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat. Satu-satunya cara menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa adalah melalui jalur hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja hal itu tidak terlihat di dalam regulasi Pemilu yang sangat jauh dari harapan. Berbagai materi yang terdapat didalamnya belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian dengan pengaturan yang konsisten. Bentuk pertama dari persoalan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu adalah dalam tahapan penentuan peserta Pemilu, yang dalam hal ini adalah penetapan partai politik yang berhak untuk ikut serta dalam Pemilu tersebut. Secara kelembagaan antara KPU dengan Bawaslu belum terdapat kejelasan bagaimana kewenangan Bawaslu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu.

Kata Kunci: Fungsional, KPU, Bawaslu, Verifikasi, Partai Politik, Pemilu

Functional Relationship between the KPU and Bawaslu in Carrying out Verification of Political Parties Contending in General Elections

Abstract

A relationship based on the functions of each government, which influence and depend on each other. In holding elections, it is very difficult to avoid violations and disputes, because in holding elections there are many interests involved. The only way to resolve all violations and disputes is through legal channels, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. It's just that this is not visible in the election regulations which are very far from expectations. The various materials contained therein cannot fully provide certainty with consistent arrangements. The first form of legal problem that occurs in holding elections is in the stage of determining election participants, which in this case is determining which political parties have the right to participate in the election. Institutionally, there is no clarity between the KPU and Bawaslu regarding Bawaslu's authority in verifying political parties participating in the Election.

Keywords: Functional, KPU, Bawaslu, Verification, Political Parties, Election